

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU:**

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Aprilani Soegiarto, 1976, *Bibliografi Beranotasi Tentang Lingkungan Hidup Dan Pencemaran Laut*, Lembaga Oceanologi Nasional LIPI, Jakarta
- Bernard L Tanya dkk, 2019, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Choky Ramdhan, 2016, *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan
- Eddy O S Hiariej, 2016, *Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Fajar Sugianto, 2014, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum, Seri Kesatu, Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Fauzia Rahawarin, 2019, *Hukum Pidana Lingkungan Pengelolaan dan Pengendalian Kualitas Air Sungai Batu Merah Ambon*, LP2M IAIN Ambon, Ambon
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusatara Persada Utama, Tangerang
- Gandjar Laksmiana Bonaprpta Bondan, *Buku Informasi-Modul Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta
- George Ritzer, 2004, *Edisi terbaru Teori Sosiologi*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- George Ritzer, 2011, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budhiartha, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang
- Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta
- Laode M. Syarif dkk, 2015, *Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi Dan Studi Kasus, Kemitraan Partnership*, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

- Moh. Fadli, dkk, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Muhammad Akib, 2012, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Muhammad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT Refika Aditama, Bandung
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Prim Haryadi, 2022, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang
- Richard Posner, 1986, *Economic Analysis Of Law Third Edition*, Wolters Kluwer Law & Business
- Rochmani, 2018, *Hukum Lingkungan Dan Penegakan Hukum*, Pustaka Magister Semarang, Semarang
- Sabian Utsman, 2011, *Living Law: Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia Cetakan Ketiga*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red&White Publishing, Indonesia

#### **JURNAL:**

- Aan Aswari, 2016, *Sibernetika Teknologi Siber dan Kebutuhan Hukum*, *Lentora Justice*, Vol. 3 No.2, Desember 2016
- Adhi Putra Satria, 2020, *Sibernetika Talcott Parsons: Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Indonesia*, *Indonesian State Law Review*, Vol.2 No.2, April 2020
- Andri G. Wibisana, 2008, *Instrumen Ekonomi Atau Privatisasi Pengelolaan Lingkungan? Komentor atas RUU Jasa Lingkungan*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-38 No. 4 Oktober-Desember 2008*
- Bachtiar Marbun, 2021, *Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr)*, *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Volume 1, Nomor 1, Oktober 2021*

BPHN Kemenkumham RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2015, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan*, Jakarta

Christopher D. Stone, 1972, Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights For Natural Objects, *Southern California Law Review* 45 (1972): 450-501

Femilya Herviani, dkk, 2022, Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang, *Jurnal Inelektualitas: Keislaman, Sosial dan Sains* Vol.11,1 (Juni,2022)

Gary S. Becker, 1968, Crime and Punishment: An Economic Approach, *The Journal of Political Economy*, Vol. 76, No. 2 (Mar-Apr., 1968),

Hanafi Amrani, 2001, Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Peranan Hukum Dalam Pembangunan, *Jurnal Hukum* No. 18 Vol.8 Oktober 2001

Ibnu Elmi, dkk, 2021, Siberatika Hukum Talcott Parsons Sebagai Landasan teoritis Dan Formulasi Teori Hukum, *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, No. 7 Tahun 2021, ISBN: 978-623-97298-3-7

Muhamad Muhdar, 2009, Eksistensi Polluter Pays Principle Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 1. Februari 2009

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Naskah Akademik Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059

Republik Indonesia, “*Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Lembaran Negara tahun 2021 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634

Republik Indonesia, “*Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup*”, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 228 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6134

Republik Indonesia, “*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi*”, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 2058

Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*”, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401

Republik Indonesia, “*Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634



Republik Indonesia, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Republik Indonesia, “*Peraturan Jaksa Agung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi*”, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 1572

Republik Indonesia, “*Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Lembaran Negara Tahun 2022

Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset*, Berita Negara tahun 2020 Nomor 568

### **PUTUSAN:**

Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 240/Pid.B/2020/PN Sak perihal Pemeriksaan Tingkat Pertama atas nama Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah, 26 Januari 2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Desember 2004

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg perihal Pemeriksaan Tingkat Pertama atas nama Terdakwa CV Premium Concept Denim Specialist, 17 Desember 2019

Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.Plw perihal Pemeriksaan Tingkat Pertama atas nama Terdakwa PT Adei Planation, 9 September 2014

Putusan Pengadilan Negeri Namlea 25/Pid.B/LH/2019/PN.Nla perihal Pemeriksaan Tingkat Pertama atas nama Terdakwa PT Prima Indo Persada, 12 September 2019

### **ARTIKEL:**

Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan Internasional, 2018, *Perundingan Organization For Economic Cooperation And Development (OECD)* laman <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/apec-oi/organisasi-internasional/oecd>, diakses pada tanggal 21 September 2022

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021, Refleksi KLHK 2021: Capaian Pemulihan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan, diakses pada laman <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6340/refleksi-klhk-2021-capaian-pemulihan-daerah-aliran-sungai-dan-rehabilitasi-hutan> pada tanggal 1 Maret 2023

Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis Ke VI UGM di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955

OECD, Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning International Economic Aspects of Environmental Policies, OECD/L.GAL/0102, laman <https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/4/4.en.pdf> diakses pada tanggal 21 September 2022

Raihan Hasya, 2023, Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Kembali Menurun pada Tahun 2022, diakses pada laman <https://goodstats.id/article/luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia-kembali-menurun-pada-tahun-2022-XahGj#:~:text=Sepanjang%202022%20hingga%20November%2C%20luas,2021%20terdapat%20sekitar%20358.867%20hektare.&text=Angka%20luas%20karhutla%20pada%202021,2020%20yang%20mencapai%20296.942%20hektare> pada tanggal 1 Maret 2023

Suparji Achmad, *Pendekatan Economic Analisis Of Law Dalam RUU Pengampunan Pajak*, diakses pada laman <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-Revisi-Undang-Undang-Pilkada-menuju-Pematangan-Demokrasi-Indonesia-1466048085.pdf> tanggal 7 Februari 2023

